

ANCAMAN KARHUTLA DI KALA EL-NINO MENERPA:
**UPDATE KARHUTLA INDONESIA
JANUARI—AGUSTUS 2023**



Penulis: Fadli A. Naufal dan Sadam Afian

ANCAMAN KARHUTLA DI KALA EL-NINO MENERPA:
**UPDATE KARHUTLA INDONESIA
JANUARI—AGUSTUS 2023**

Penulis: Fadli A. Naufal dan Sadam Afian

Temuan Kunci

1. Akumulasi angka Area Indikatif Terbakar di Indonesia selama Januari—21 Agustus 2023 telah mencapai 262 ribu ha. Angka ini sudah melampaui luas lahan terbakar tahun lalu, yakni 204 ribu ha.¹ Karena El-Nino diprediksi BMKG akan mencapai puncaknya pada Agustus—September, angka karhutla dikhawatirkan masih akan meningkat tajam apabila upaya penanggulangan karhutla kurang intensif.
2. Kenaikan luas Area Indikatif Terbakar yang cukup ekstrem terjadi di Provinsi Kalimantan Barat dengan kenaikan 30 kali lipat pada Agustus 2023 dibandingkan Juni 2023. Sementara itu, dua (2) dari sepuluh (10) provinsi dengan total Area Indikatif Terbakar terluas, yaitu Aceh dan Papua, belum menetapkan status Siaga Darurat Karhutla.
3. Angka Area Indikatif Terbakar di wilayah izin dan konsesi melejit berkali-kali lipat selama Juni—Agustus. Luas AIT di izin perkebunan sawit naik 24 kali lipat, di PBPH-HA (*logging*) naik 17 kali lipat, di PBPH-HT (hutan tanaman) dan konsesi minerba masing-masing naik 15 kali lipat, dan di konsesi migas naik 10 kali lipat.
4. Meskipun turun dibandingkan tahun sebelumnya, masih tingginya Area Indikatif Terbakar di wilayah ekosistem gambut, PIPPIB, dan PIAPS tetap harus menjadi perhatian karena merupakan area prioritas untuk dilindungi.

¹ Tabulasi luas kebakaran. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Karhutla Monitoring Sistem." Peta - Sipongi+, <https://sipongi.menlhk.go.id>. Diakses 25 Agustus 2023.

A. Pendahuluan

Laporan Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) Mei lalu menunjukkan bahwa potensi El-Nino terus meningkat dari Mei hingga Agustus 2023.² Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pun telah memperingatkan bahwa El-Nino yang melanda Indonesia dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mirip seperti bencana karhutla tahun 2019.³

Karhutla telah terjadi sejak 1982 dan penanganannya telah menghabiskan triliunan rupiah. Untuk penanganan 747 kasus di tahun 2019 saja, Pemerintah Pusat mengeluarkan dana mencapai Rp3,4 triliun.⁴ Belum lagi kerugiannya yang ditaksir mencapai Rp72,95 triliun.⁵

Karhutla sebagian besar disebabkan oleh pembukaan lahan untuk bisnis maupun berladang dengan cara membakar yang dipilih karena dianggap sebagai cara termurah.⁶ Dalam kurun 2015–2021, KLHK telah mencabut tiga izin operasional, hingga 743 sanksi administratif bagi para perusahaan-perusahaan pembakar hutan.⁷ Baru-baru ini, KLHK memenangkan gugatan atas perusahaan sawit PT Kumai Santosa yang mengharuskan perusahaan tersebut untuk membayar ganti rugi sebesar Rp175 miliar.⁸

Dampak buruk Karhutla terhadap masyarakat sangat signifikan. Dalam rentang 2009–2019, 443.278 orang telah menjadi korban, termasuk korban meninggal atau hilang, luka-luka, dan yang terpaksa mengungsi.⁹ Karhutla juga mengancam pencapaian komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi yang dikukuhkan melalui dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan FOLU Net Sink 2030. Target NOL karhutla yang ditetapkan Pemerintah pada tahun 2030 sedang menghadapi tantangan besar.

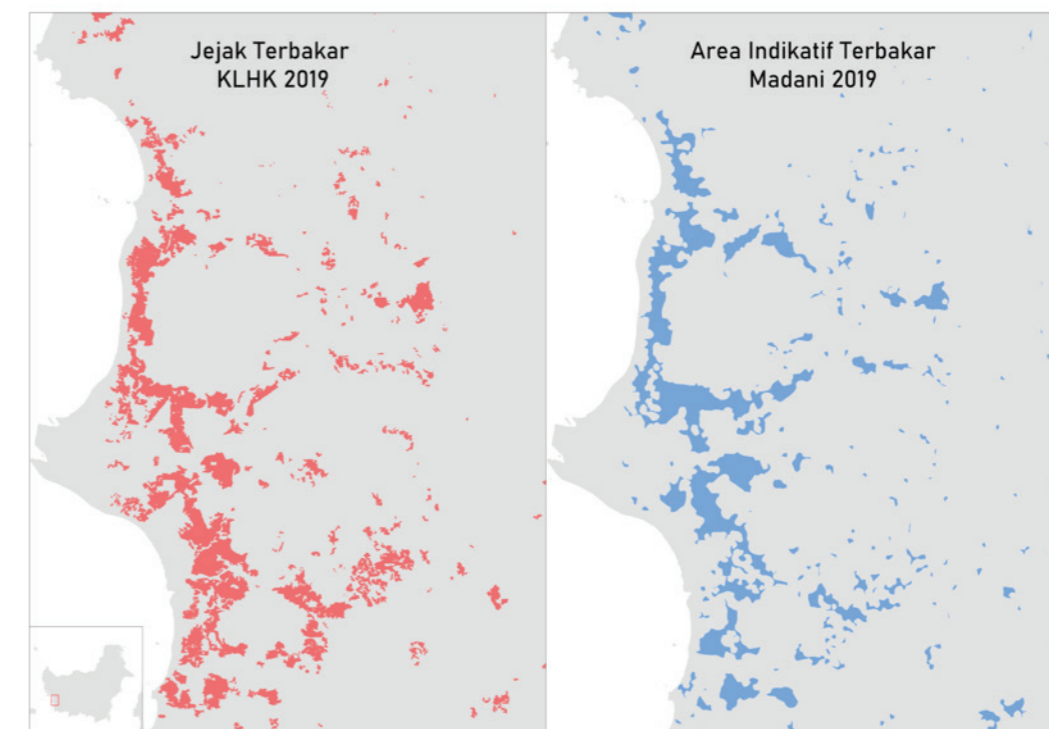
Madani *Update* kali ini akan mengulas beberapa temuan atas situasi karhutla saat ini. Istilah Area Indikatif Terbakar (AIT) digunakan untuk menunjukkan area yang diperkirakan telah/sedang terbakar. *Update* ini diharapkan dapat menjadi kontribusi MADANI Berkelanjutan untuk memperkuat penanggulangan karhutla di Indonesia, termasuk upaya penegakan hukumnya.

- Judith, M. Paschalia. "Ujian El Nino untuk Indonesia." Kompas.id, 23 May 2023, <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/05/19/el-nino-uji-kedalaman-ibu-pertiwi-mengenal-panganannya-kalau-boleh-terbit-seninselasarabukamis>. Diakses 10 Agustus 2023.
- Dyantoro, Sunu. "Di Sidang Kabinet BMKG Ingatkan El Nino Bisa Berdampak Karhutla Mirip 2019." Tekno Tempo.co, 9 Agustus 2023, <https://tekno.tempo.co/read/1757825/di-sidang-kabinet-bmkg-ingatkan-el-nino-bisa-berdampak-karhutla-mirip-2019>. Diakses 10 Agustus 2023.
- Pador, Zenwen. "Alih-alih Terus Memadamkan, Mungkinkah Karhutla Dicegah? - Mongabay.co.id." Mongabay, 23 Juli 2021, <https://www.mongabay.co.id/2021/07/23/alih-alih-terus-memadamkan-mungkinkah-karhutla-dicegah/>. Diakses 10 Agustus 2023.
- KLHK, Policy Brief Edisi Nomor 9 Tahun 2020, <https://www.menlhk.go.id/uploads/site/post/1634774994.pdf> diakses 14 Agustus 2023.
- Saharjo, Bambang Hero. 2016, "Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan Indonesia", IPB Press, Bogor.
- Saturi, Sapariah. "Sulitnya Eksekusi Kasus Karhutla Walau Sudah Berkekuatan Hukum Tetap, Mengapa?" Mongabay, 7 Juli 2021, <https://www.mongabay.co.id/2021/07/07/sulitnya-eksekusi-kasus-karhutla-walau-sudah-berkekuatan-hukum-tetap-mengapa/>. Diakses 11 Agustus 2023.
- KLHK, "Permohonan PK KLHK Dikabulkan, Mahkamah Agung Hukum PT KS Harus Bayar Ganti Rugi Kebakaran Lahan 175 Milyar Rupiah", https://www.menlhk.go.id/site/single_post/5538/permohonan-pk-klhk-dikabulkan-mahkamah-agung-hukum-pt-ks-harus-bayar-ganti-rugi-kebakaran-lahan-175-milyar-rupiah, diakses 22 Agustus 2023
- Jayani, Dwi Hadya, Katadata, "Korban Kebakaran Hutan dan Lahan 2009-2019", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/17/korban-kebakaran-hutan-dan-lahan-karhutla-2009-2019#:~:text=Karhutla%20periode%202009%2D2019%20mengakibatkan,terpaksa%20mengungsi%20sebanyak%20442.873%20orang>. Diakses 22 Agustus 2023

B. Data Dan Metodologi

Area Indikatif Terbakar (AIT) adalah estimasi area yang diduga tinggi telah/sedang terbakar berdasarkan data sebaran titik panas yang terkumpul dan bertahan pada waktu yang relatif lama. Dengan AIT, para pihak bisa mendapatkan gambaran pergerakan kebakaran dari bulan ke bulan yang relatif lebih dini (*near real-time*) sehingga bisa mencegah perluasan karhutla. Model ini telah mengeluarkan area-area yang memancarkan panas selain karhutla seperti gunung api, utilitas, dan bangunan berisiko panas. Dalam 4 tahun terakhir, persandingan pemodelan AIT dengan *burn scar* yang dikeluarkan KLHK memiliki persentase kemiripan 82–97%. Artinya AIT bisa dikatakan cukup kredibel untuk mengetahui indikasi karhutla dengan lebih cepat (sebelum lahan terbakar) dan dapat menentukan langkah strategis lain bagi mitigasi karhutla.

Gambar 1. Persandingan Analisis Jejak Terbakar KLHK dan AIT MADANI Berkelanjutan Tahun 2019



Sumber: Analisis MADANI Berkelanjutan

C. Pembahasan

1. Area Indikatif Terbakar Januari–21 Agustus 2023 sudah Melampaui Luasan Terbakar Tahun Lalu

Area Indikatif Terbakar selama Januari hingga 21 Agustus 2023 meluas sangat cepat hingga mencapai 262 ribu ha. Angka tersebut sudah melampaui total luas lahan terbakar tahun lalu sebesar 204 ribu ha. Perlu dicatat, 85% AIT muncul hanya dalam dua (2) bulan terakhir. Hampir seluruh AIT (97%) meluas ke area terbakar baru setiap bulannya. Sebaran AIT ditandai dengan warna merah pada peta di bawah.

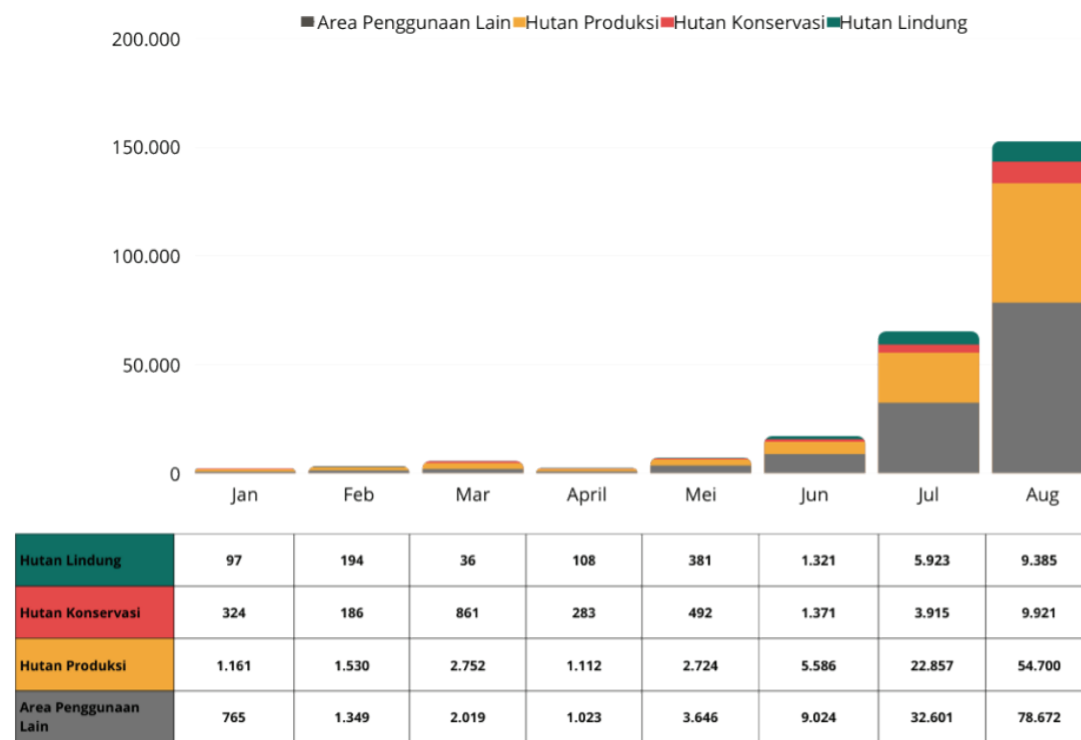
Gambar 2. Sebaran Area Indikatif Terbakar Januari–21 Agustus 2023



Sumber: Analisis MADANI Berkelanjutan

Area Indikatif Terbakar di dalam kawasan hutan dan di Area Penggunaan Lain hampir sama besarnya (49,7% vs. 50,2%). Akumulasi AIT terbesar terjadi di Area Penggunaan lain dan Hutan Produksi, yaitu sebesar 129 ribu ha dan 92 ribu ha

Grafik 1. Area Indikatif Terbakar Januari–Agustus 2023 Berdasarkan Kawasan (Ha)



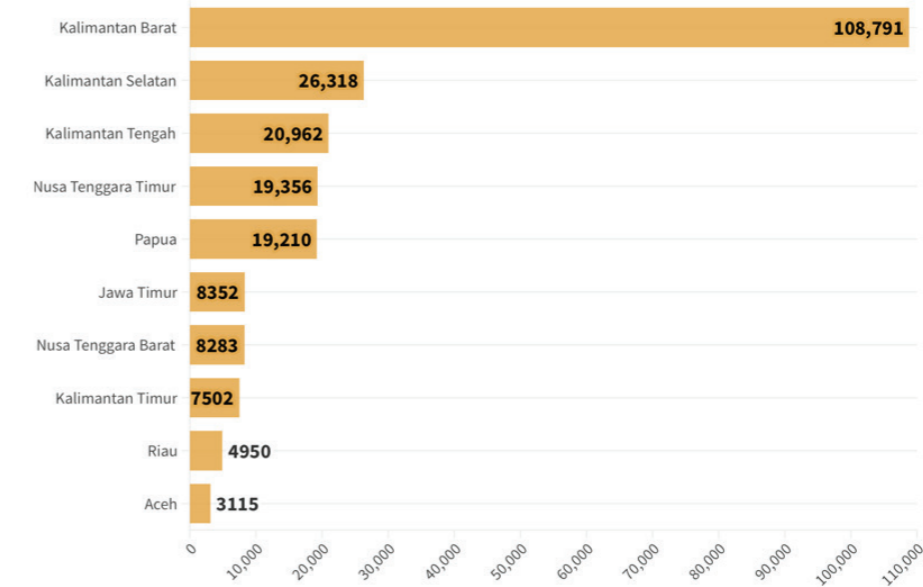
Sumber: Analisis MADANI Berkelanjutan

Eksistensi dan kelestarian hutan alam dapat menekan karhutla. Area Indikatif Terbakar yang terjadi di hutan alam hanya 8% sementara 92% terjadi di tutupan lahan nonhutan alam. Artinya, menjaga kelestarian hutan alam akan mencegah kebakaran yang lebih parah. Sebaliknya, deforestasi dan degradasi akan meningkatkan risiko karhutla.

2. Provinsi Kalimantan Barat Sumbang AIT Terluas dan 2 dari 10 Provinsi AIT Terluas Belum Tetapkan Siaga Darurat Karhutla

Sepuluh provinsi dengan akumulasi angka AIT terbesar Januari–21 Agustus 2023 adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Papua, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Riau, dan Aceh.

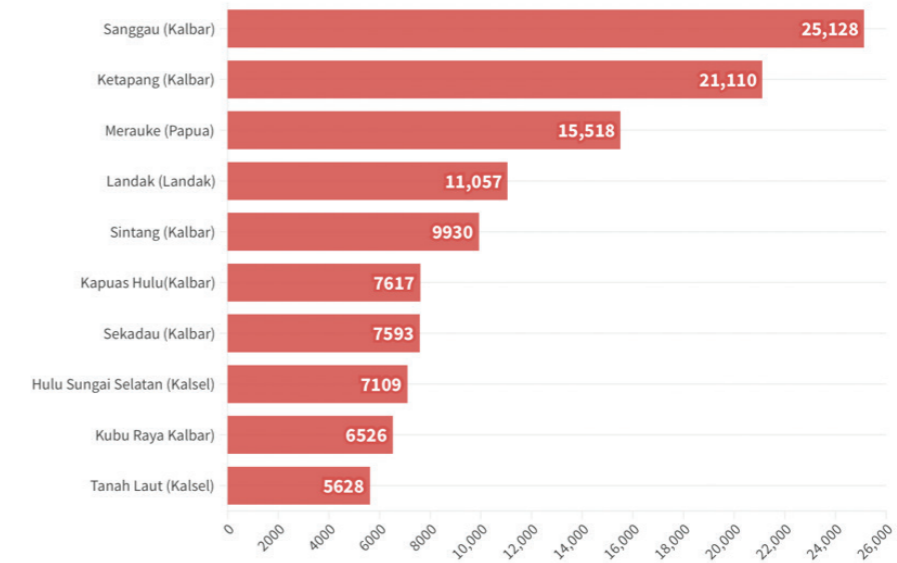
Grafik 2. 10 Provinsi dengan Area Indikatif Terbakar Terluas Periode Januari–21 Agustus 2023 (Ha)



Sumber: Analisis MADANI Berkelanjutan

Kalbar menjadi provinsi dengan ledakan Area Indikatif Terbakar. AIT di Kalbar naik 30 kali lipat pada bulan Agustus dibandingkan bulan Juni. Bahkan, AIT di Kab. Sanggau naik 147 kali lipat dan Kab. Ketapang naik 23 kali lipat pada periode yang sama.

Grafik 3. 10 Kabupaten dengan Area Indikatif Terbakar Terluas Periode Januari–21 Agustus 2023 (Ha)



Sumber: Analisis MADANI Berkelanjutan

Dari kesepuluh provinsi dengan AIT terbesar di Tabel 1, delapan (8) provinsi telah menetapkan status Siaga Darurat Karhutla. Dua (2) sisanya yang belum menetapkan status Siaga Darurat Karhutla adalah Aceh dan Papua. Selengkapnya pada tabel di bawah:

Tabel 1. Status Siaga Darurat di 10 Provinsi dengan AIT Terbesar

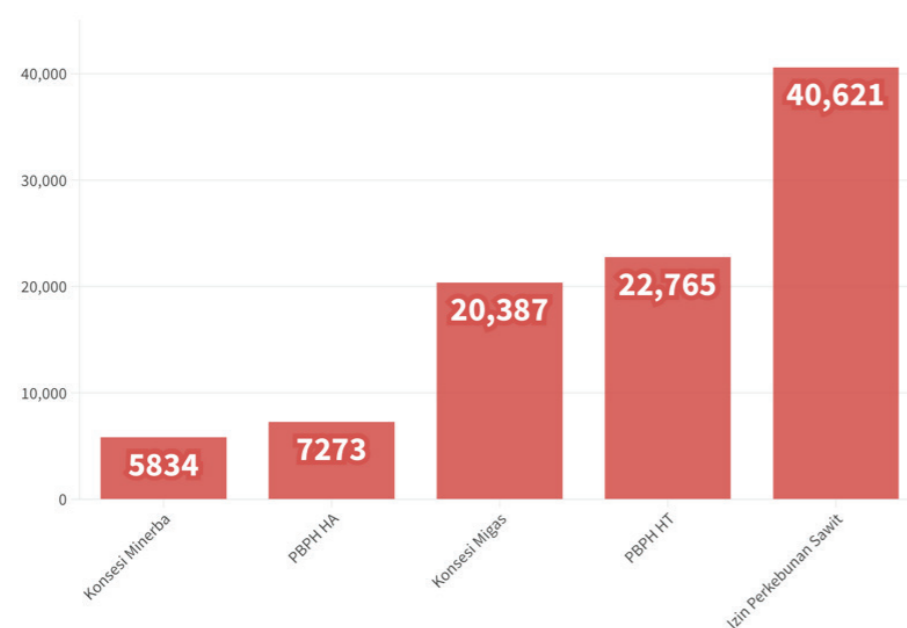
No	Provinsi	Status Siaga Darurat
1	Kalimantan Barat	Siaga Darurat Karhutla dan Bencana Asap hingga 31 Oktober 2023
2	Kalimantan Selatan	Siaga Darurat Bencana Karhutla dan Kekeringan hingga 15 November 2023
3	Kalimantan Tengah	Siaga Darurat Karhutla hingga 10 November 2023
4	Nusa Tenggara Timur	Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Karhutla hingga Oktober 2023
5	Papua	-
6	Jawa Timur	Siaga Darurat Kekeringan dan Karhutla hingga 17 November 2023
7	Nusa Tenggara Barat	Siaga Darurat Kekeringan dan Karhutla
8	Kalimantan Timur	Siaga Darurat Kekeringan dan Karhutla
9	Riau	Siaga Darurat Karhutla hingga 30 November 2023
10	Aceh	-

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

3. Area Indikatif Terbakar di Wilayah Izin dan Konsesi Meningkat Signifikan dari Juni hingga Agustus

Akumulasi Area Indikatif Terbakar di lima (5) jenis wilayah izin dan konsesi mencapai 113 ribu ha atau 44% dari total AIT. Izin perkebunan sawit yang tidak tumpang tindih dengan izin/konsesi lain menyumbang AIT terbesar dengan akumulasi luas 40,6 ribu ha, disusul PBPH HT (hutan tanaman), konsesi migas, PBPH-HA (*logging*), dan konsesi minerba - selengkapnya di Gambar 7.

Grafik 4. Izin/Konsesi dengan Akumulasi Area Indikatif Terbakar Terbesar Januari–21 Agustus 2023 (Ha)*



Sumber: Analisis MADANI Berkelanjutan

AIT di izin dan konsesi menunjukkan kenaikan signifikan dari Juni hingga Agustus 2023. Dari

kesepuluh provinsi dengan AIT terbesar di Tabel 1, delapan (8) provinsi telah menetapkan status Siaga Darurat Karhutla. Dua (2) sisanya yang belum menetapkan status Siaga Darurat Karhutla adalah Aceh dan Papua.¹⁰

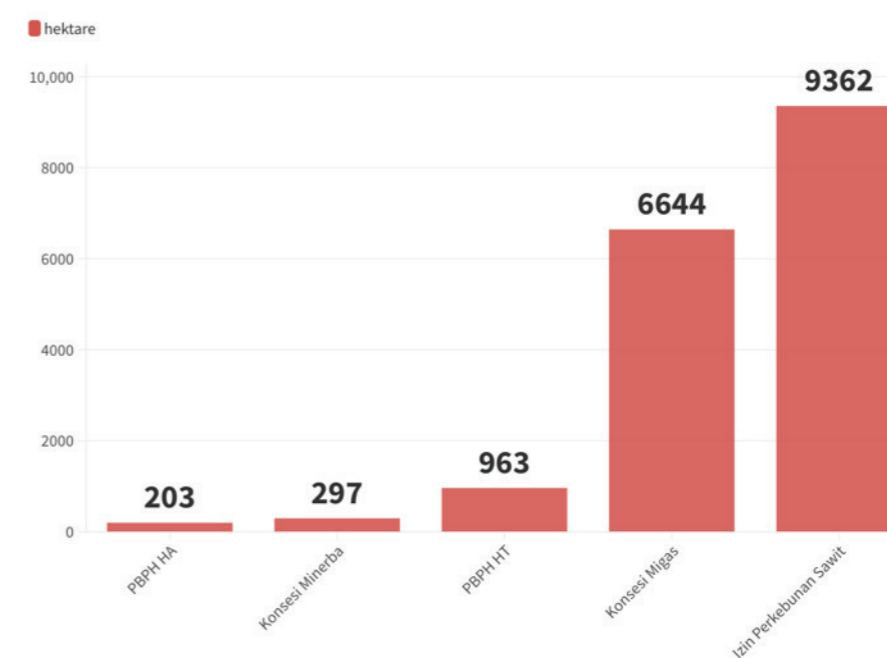
4. Area Indikatif Terbakar di Ekosistem Gambut, PIPPIB dan PIAPS Turun Dibandingkan Tahun Lalu, tetapi Masih Luas

Akumulasi luas AIT di ekosistem gambut pada Januari-21 Agustus 2023 telah mencapai **45 ribu ha** atau 18%. Persentase AIT di ekosistem gambut tahun ini turun dari tahun lalu sebesar 37%. Namun, Area Indikatif Terbakar di ekosistem gambut perlu menjadi perhatian khusus karena sulit dipadamkan, melepaskan emisi GRK yang besar, dan menimbulkan kabut asap yang membahayakan kesehatan.

AIT di ekosistem gambut paling banyak terjadi di luar izin/konsesi, yaitu 25,5 ribu ha (57%). AIT di ekosistem gambut di dalam izin mencapai 19,5 ribu ha (43%). AIT di gambut paling banyak terdapat di izin Sawit seluas 9,3 ribu ha dan di konsesi migas seluas 6,6 ribu ha.

Hanya sekitar 15% atau 36,7 ribu ha AIT berada di area moratorium (PIPPIB) dan alokasi perhutanan sosial (PIAPS). Angka ini turun dari persentase AIT tahun sebelumnya sebesar 35%. Di sisi lain, memasuki Juli-Agustus, AIT di area ini naik cukup tajam. Artinya, dengan adanya El-Nino kuat, tidak menutup kemungkinan angka ini akan kembali naik.

Grafik 5. Area Indikatif Terbakar di Ekosistem Gambut di dalam Izin/Konsesi (ha)*



Sumber: Analisis MADANI Berkelanjutan

*Tidak menghitung AIT di area izin/konsesi yang tumpang-tindih

10 Angka ini dihitung di dalam izin/konsesi yang tidak saling tumpang-tindih. Jika memasukkan angka AIT di wilayah yang tumpang tindih, angka ini bisa jadi lebih besar.

D. Tantangan Besar Menghadapi El-Nino di Tahun Politik

Tahun ini, Indonesia menghadapi El-Nino yang akan menyebabkan kekeringan. Secara historis, El-Nino menyebabkan karhutla dengan skala yang luas. Pada 2015 dan 2019, fenomena El-Nino cukup ekstrem hingga menyebabkan karhutla yang cukup besar, yakni 2,6 juta pada 2015 dan 1,6 juta ha pada 2019.

Selain itu, tahun ini kita juga akan menghadapi tahun politik yang sarat dengan pemberian izin besar-besaran dalam sektor SDA. Walhi mencatat bahwa tahun politik biasanya adalah tahun dengan angka penerbitan izin lingkungan yang meningkat hingga ratusan kali lipat.¹¹ Dengan melihat fakta bahwa sebagian besar konsesi masih menggunakan cara membakar, maka tren ini menjadi tanda bahaya ancaman karhutla.

Berdasarkan paparan di atas, para pengambil kebijakan terkait diharapkan lebih intensif dalam mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan karhutla dengan turut memperhatikan kebutuhan masyarakat, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan upaya intensif pencegahan dan penanggulangan karhutla di sepuluh (10) provinsi, serta kabupaten-kabupaten dengan akumulasi Area Indikatif Terbakar terbesar, khususnya di Prov. Kalimantan Barat, serta Kab. Sanggau, dan Kab. Ketapang;
2. Menetapkan Siaga Darurat Karhutla di Provinsi Aceh dan Papua;
3. Memprioritaskan pemadaman dan penanganan asap di area ekosistem gambut yang terindikasi terbakar serta memasukkan ekosistem gambut yang terbakar ke dalam Peta Prioritas Restorasi Gambut 2024;
4. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di area izin dan konsesi dengan penekanan pada wilayah izin perkebunan sawit, PBPH-HT, dan konsesi migas;
5. Menghentikan pemberian izin di area hutan alam dan ekosistem gambut, terutama sebelum, selama, dan setelah Pemilihan Umum 2024 dan melakukan *review* perizinan yang tumpang-tindih dengan area PIPPIB dan PIAPS;
6. Meningkatkan langkah pencegahan karhutla yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, misalnya bantuan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB), untuk mengurangi dampak negatif penanggulangan karhutla terhadap mata pencaharian masyarakat.

11 Pradipta Pandu Mustika, Kompas 24 April 2023, "Menanti Komitmen Lingkungan Para Tokoh di Tahun Politik", <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/04/24/menanti-komitmen-lingkungan-para-tokoh-di-tahun-politik>, diakses 9 Agustus 2023

E. Referensi

"Abai Gambut di Restorasi, Ancaman Karhutla Muncul Kembali." *Pantau Gambut*, 2 Maret 2023, <https://pantaugambut.id/kabar/abai-gambut-di-restorasi-ancaman-karhutla-muncul-kembali>. Diakses 11 Agustus 2023.

Dyantoro, Sunu. "Di Sidang Kabinet BMKG Ingatkan El Nino Bisa Berdampak Karhutla Mirip 2019." *Tekno Tempo*. co, 9 Agustus 2023, <https://tekno.tempo.co/read/1757825/di-sidang-kabinet-bmkg-ingatkan-el-nino-bisa-berdampak-karhutla-mirip-2019>. Diakses 10 Agustus 2023.

Hadya, Jayani, Dwi. "Korban Kebakaran Hutan dan Lahan 2009-2019", *Katadata*, 17 September 2019, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/17/korban-kebakaran-hutan-dan-lahan-karhutla-2009-2019#:~:text=Karhutla%20periode%202009%2D2019%20mengakibatkan,terpaksa%20mengungsi%20sebanyak%20442.873%20orang>. Diakses 22 Agustus 2023

Judith, M. Paschalia. "Ujian El Nino untuk Indonesia." *Kompas.id*, 23 May 2023, <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/05/19/el-nino-uji-kedalaman-ibu-pertiwi-mengenal-panganannya-kalau-boleh-terbit-seninselasarabukamis>. Diakses 10 Agustus 2023.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Policy Brief Edisi Nomor 9 Tahun 2020." <https://www.menlhk.go.id/uploads/site/post/1634774994.pdf>. Diakses 14 Agustus 2023.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Permohonan PK KLHK Dikabulkan, Mahkamah Agung Hukum PT KS Harus Bayar Ganti Rugi Kebakaran Lahan 175 Milyar Rupiah." *Menlhk.go.id*, 21 Agustus 2023, https://www.menlhk.go.id/site/single_post/5538/permohonan-pk-klhk-dikabulkan-mahkamah-agung-hukum-pt-ks-harus-bayar-ganti-rugi-kebakaran-lahan-175-milyar-rupiah. Diakses 22 Agustus 2023

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Karhutla Monitoring Sistem." *Peta - Sipongi+*, <https://sipongi.menlhk.go.id>. Diakses 25 Agustus 2023.

Mustika, Pradipta Pandu. "Menanti Komitmen Lingkungan Para Tokoh di Tahun Politik." *Kompas*, 24 April 2023. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/04/24/menanti-komitmen-lingkungan-para-tokoh-di-tahun-politik>, Diakses 9 Agustus 2023

Pador, Zenwen. "Alih-alih Terus Memadamkan, Mungkinkah Karhutla Dicegah? - Mongabay.co.id." *Mongabay*, 23 Juli 2021, <https://www.mongabay.co.id/2021/07/23/alih-alih-terus-memadamkan-mungkinkah-karhutla-dicegah/>. Diakses 11 Agustus 2023.

Saharjo, Bambang Hero. 2016. *Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan Indonesia*. IPB Press, Bogor.

Saturi, Sapariah. "Sulitnya Eksekusi Kasus Karhutla Walau Sudah Berkekuatan Hukum Tetap, Mengapa?" *Mongabay*, 7 Juli 2021, <https://www.mongabay.co.id/2021/07/07/sulitnya-eksekusi-kasus-karhutla-walau-sudah-berkekuatan-hukum-tetap-mengapa/>. Diakses 11 Agustus 2023.

Madani



Masyarakat dan Alam Indonesia (MADANI) Berkelanjutan adalah lembaga nirlaba yang bergerak menanggulangi krisis iklim melalui riset dan advokasi.

Didirikan pada 2016, MADANI Berkelanjutan berupaya mewujudkan pembangunan Indonesia yang berimbang antara aspek ekonomi, ekologi, dan sosial. Kami merumuskan dan mempromosikan solusi-solusi inovatif bagi krisis iklim dengan cara menjembatani kolaborasi antara berbagai pihak. Saat ini, fokus kerja MADANI Berkelanjutan meliputi isu hutan dan iklim, komoditas berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan pada tingkat daerah, dan biofuel.

Jl. Mesjid Al Hidayah No 14A, RT:04/07,
Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta
Selatan, 12520.

